



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 9 (Sembilan)
- Tahun Sidang : 2023-2024
- Masa Persidangan : I
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).
- Hari, Tanggal : Rabu, 13 September 2023
- Pukul : 14.00 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka.
- Pimpinan Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : Pembahasan mengenai :
1. Penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2024 (sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran);
 2. Lain-lain
- Hadir : 1. 28 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, *Bpk. Kukuh S. Achmad*;
 3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *M. Afif Hasbullah*;
 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, *Bpk. Muhammad Rudi* ;
 5. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, *Bpk. Teuku Zanuarsyah*
- Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) pada pukul 14.25 WIB
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 13 September 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.230.848.645.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.115.485.314.000,- (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.2.662.635.880.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
4. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian hasil Pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp.62.306.538.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
5. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk melanjutkan sosialisasi dan komunikasi serta memberikan perhatian kepada para korban terkait permasalahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.15 WIB.

**KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL**

Ttd.

KUKUH S ACHMAD

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MARTIN MANURUNG, S.E., M.
A-352

**KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA**

Ttd.

M AFIF HASBULLAH

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM**

Ttd.

MUHAMMAD RUDI

**WAKIL KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

Ttd.

TEUKU ZANUARSYAH